

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**ACHBAR ARDIANSYAH PUTRA**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ACHBAR ARDIANSYAH PUTRA  
A311 10 118**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

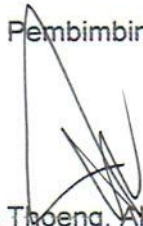
disusun dan diajukan oleh

**ACHBAR ARDIANSYAH PUTRA**  
**A311 10 118**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

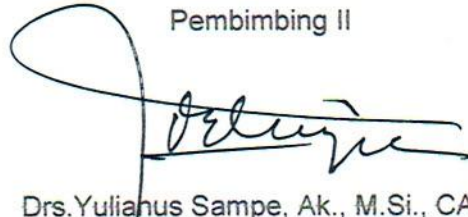
Makassar, 16 Agustus 2017

Pembimbing I




Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP.  
NIP 195611211986031001

Pembimbing II



Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA  
NIP 195607221987021001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19650925 199002 2 001



# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

disusun dan diajukan oleh


**ACHBAR ARDIANSYAH PUTRA**  
**A311 10 118**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **18 Agustus 2017** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Ruman Thoeng, Ak., M.Com., BAP.	Ketua	1. ....
2.	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. ....
3.	Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. ....
4.	Drs. Muallimin, M.Si.	Anggota	4. ....
5.	Drs. Syahrir, Ak., M.Si., CA	Anggota	5. ....

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19650925 199002 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Achbar Ardiansyah Putra

NIM : A311 10 118

departemen/program studi : Akuntansi/S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Achbar Ardiansyah Putra

## **PRAKATA**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang memungkinkan saya menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Analisis Penerapan Peraturan Pajak dan Akuntansi Pajak pada PT. Pinko Graha Lestari Indah dalam Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan"

Penulis dengan segala kerendahan hati tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dan tersayang, atas kesabaran beliau telah mendidik penulis sedari kecil hingga saat ini, beliau dan saudara (i) penulis adalah segalanya, selalu menjadi penyemangat buat saya, serta keluarga besar dan orang yang spesial bagi penulis, baik dukungan moril dan materi serta doa dari mereka dalam proses penyusunan skripsi.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bapak Drs. H. Muhammad Darwis dan Ibu Dra. Hj. Sitti Rosnani Karay, M.Si., yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
2. Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.S.A., CA, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., dan Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Tim penguji peneliti, Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Drs. Muallimin, M.Si, dan Bapak Drs. Syahrir, Ak., M.Si., CA, yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kakak Wulandary Darwis, S.H., Adik Nurul Habibah dan adik Sitti Hafizah yang selalu memberikan dukungan, dan semangat yang tak pernah putus.
6. Azwin Harianto, S.E., Azhar Fauzan, S.Ked., Muhammad Arsyad, S.H., Dede Darmanto, S.E., Putri Fitasari, S.E., Diandra Azalea, S.K.M., Restu Mutmainnah, S.E., Wildan Saifullah, S.E., Anneke Putri, Muh. Rezky Satria R., S.H., yang sudah memberi saran, mendorong, dan banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai..
7. Kantor PT. Pinko Graha Lestari Indah dan seluruh petugas yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Enggenk, Sasky, Alam, Frans, Gery, Yaya, Pai, Awal, Rian, Didid, Ammar, Chaezar, Aan, Naim, Kisman, Prawira, Iank, Praja, Chepy, adalah *sob-sobcu* yang selalu hadir dengan keceriaan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Salute mi Familia!*

9. Segenap keluarga besar KPA Handaki Makassar, Kata Kerja, Suneza, Oe' Famili Ink Studio, Garasi VW. Rumah Kecil, Musik Hutan, Makassar Berlibur, dan Potlot yang telah memberikan banyak pembelajaran bagi peneliti selama ini.
10. Fahriansyah, Abit, Fitrah, Farid, Fajrin, Anisah, Rivki, dan Ulla yang selama masa perkuliahan menjadi teman *carutu* peneliti di halte. Terima kasih juga peneliti ucapkan buat teman-teman Etc. 2010 yang selalu hadir dengan canda tawanya
11. Teman-teman P1Oneer yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas doa, dan dukungannya.
12. Seluruh rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dengan hati terbuka penulis tetap menunggu buah pikiran, saran-saran, dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Agustus 2017

Penulis

Achbar Ardiansyah Putra



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH DALAM RANGKA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

#### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX RULES AND TAX ACCOUNTING IN PT. PINKO GRAHA LESTARI INDAH IN TERMS OF TAX OBEDIENCE CORPORATE INCOME TAX**

Achbar Ardiansyah Putra  
Rusman Thoeng  
Yulianus Sampe

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak pada PT. Pinko Graha Lestari Indah telah sesuai dengan peraturan Pemerintah No.34 tahun 2015 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan atas tanah dan bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan atas perubahannya. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah hasil analisis perhitungan PPh final yang dilakukan oleh perusahaan selama ini dimana perusahaan dalam menghitung PPh Final sudah sesuai dengan PP 34 tahun 2015 karena sudah menggunakan tariff PPh final sebesar 1 % dari penjualan yang diterima, hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi PPh final yang dilakukan oleh perusahaan yang menunjukkan bahwa tariff PPh final digunakan dalam pengenaan PPh final sebesar 1% dari nilai bruto dan selain itu disajikan ke dalam laporan keuangan perusahaan.

**Kata Kunci:** Peraturan pajak, akuntansi pajak dan kepatuhan pajak penghasilan

*This study aims to determine and analyze the application of tax and accounting tax at PT. Pinko Graha Lestari Indah is in compliance with Government Regulation No.34 of 2015 regarding income tax on income and transfer of land and building and purchase and purchase agreement on land and building for the amendment. To implement these objectives then used the technique of data collection through observation, interview and documentation. While the data analysis technique used is comparative descriptive analysis.*

*The findings of this study are the results of final calculation of income tax calculation conducted by the company so far where the company in calculating the Final Income Tax already in accordance with the Government Regulation 34 of 2015 because it has used the final income tax tariff of 1% of sales received, the analysis of the treatment of accounting income tax final conducted by the company indicating that the final tax rate is used in the imposition of final income tax of 1% of gross value and otherwise presented in the company's financial statements.*

**Keywords:** Tax rules, tax accounting and income tax compliance

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	10
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak .....	14
2.1.4 Tarif Pajak .....	16
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.1.6 Pajak Penghasilan .....	18
2.1.7 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan .....	20
2.1.8 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .....	21
2.1.9 Koreksi Fiskal .....	24

2.1.10 Akuntansi Pajak Penghasilan .....	25
2.1.11 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No.46 .....	26
2.1.12 Pengakuan Dalam PSAK No.46 .....	29
2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	33
2.2. Penelitian Empirik .....	35
2.3. Kerangka Pikir .....	37
2.4. Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Rancangan Penelitian .....	39
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.5. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan. ....	43
4.1.2 Struktur Organisasi.....	47
4.2. Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Peraturan PPH Final .....	49
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Final...	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 2.1	Tarif Pajak .....	16
Tabel 4.1	Perbandingan Pajak Penghasilan Final menurut Perusahaan dan PP No. 34 Tahun 2016 .....	51
Tabel 4.2	PT. Pinko Graha Lestari Indah Neraca Per 31 Desember 2016	56
Tabel 4.3.	PT. Pinko Graha Lestari Laporan Perhitungan Laba Rugi Per 31 Desember tahun 2016 .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir .....	37
4.1. Struktur Organisasi .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak bagi pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin besar pula. Peranan pajak semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Pertama dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahun sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua adalah merencanakan pajak yaitu memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan untuk kewajiban pajaknya.

Keuangan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan. McClelland (1992) menyatakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh badan usaha yang berbadan hukum adalah membayar pajak. Pemenuhan dalam pembayaran pajak bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seluruh pihak. Kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian sangat diharapkan karena iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia telah berada pada pembangunan jangka panjang, sehingga dalam melaksanakan pembangunan tersebut akan terus membutuhkan dana yang semakin besar. Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dan untuk lebih meningkatkan pembangunan negara melalui sektor konstruksi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja sektor konstruksi.

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan tidak lagi pada masalah sandang dan pangan melainkan masalah papan. Hal ini berarti kegiatan industri konstruksi semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan gedung perkantoran dan fasilitasnya. Berbagai jenis perumahan sedang dan akan di bangun, termasuk jenis apartemen, kondominium, rumah susun, resort dan sebagainya. Di Indonesia, jasa konstruksi *real estate* sedang berkembang dengan pesat seiring dengan kebutuhan terhadap perumahan rakyat yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Jasa konstruksi juga terlibat penuh dalam proses perencanaan, pengawasan, instalasi dan pemeliharaan konstruksi tanah dan atau bangunan (Milanovira,2015).

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Menurut pasal 1 ayat 2 dalam PP Nomor 34 Tahun 2016, "Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak". Sifat pengenaan dari pajak penghasilan final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilalukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud, sesuai dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seiring dengan peran Jasa konstruksi dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia, maka kita juga perlu mencermati penerapan Akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi perumahan apakah sudah



sesuai atau tidak. Dampak dan manfaatnya dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak maupun dari sisi Negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak (Andaki, 2015). Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penerapan besarnya pajak terutang. Meskipun demikian ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi pajak.

Dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan istilah akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial. Istilah pembukuan atau pencatatan dalam perpajakan ini memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah akuntansi dalam akuntansi komersial. Akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah.

PT. Pinko Graha Lestari Indah adalah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi pembangunan perumahan/realstate yang berfokus pada perumahan subsidi, dengan nama perumahan Griya Arwana Lestari, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya sebagai perusahaan jasa konstruksi maka perlunya diperhatikan mengenai peraturan pajak yang berlaku, karena permasalahan yang terjadi bahwa penerapan peraturan pajak yang selama ini dilakukan belum maksimal atau belum sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan, selain itu penerapan secara akuntansi memiliki perbedaan dengan penerapan akuntansi pajak (fiscal), hal ini penting diketahui oleh setiap perusahaan karena dalam penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi mengandung berbagai jenis-jenis pajak yang melekat dalam jasa konstruksi, seperti pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan PPN. Oleh karena itulah perlunya perusahaan melakukan akuntansi pajak karena

merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar dalam pembuatan SPT.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pajak dan Akuntansi Pajak Pada PT. Pinko Graha Lestari Indah Dalam Rangka Kepatuhan PPh Badan ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: “ Apakah penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak pada PT. Pinko Graha Lestari Indah telah sesuai dengan peraturan Pemerintah No.34 tahun 2015 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan atas tanah dan bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan atas perubahannya “.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak pada PT. Pinko Graha Lestari Indah telah sesuai dengan peraturan Pemerintah No.34 tahun 2015 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan atas tanah dan bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan atas perubahannya “.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi,

khususnya yang berkaitan dengan peraturan perpajakan dan akuntansi pajak.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peraturan perpajakan dan akuntansi pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi perusahaan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tata aturan perpajakan.
- b. Memotivasi perusahaan untuk menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan akuntansi perpajakan.
- c. Menelaah fungsi-fungsi bagi peningkatan kinerja perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan.** Dalam bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

**BAB IV Pembahasan.** Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

**BAB V Penutup.** Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Obyek pajak tidak mendapatkan balas jasa dari negara secara langsung. Pajak dipungut negara kepada warga negaranya berdasarkan pada norma hukum yang telah diatur. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai operasional kenegaraan, memproduksi barang produksi untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembiayaan pembangunan berbangsa dan bernegara. Karena pungutan pajak diatur oleh undang-undang, maka penolakan untuk membayar pajak, perlawanan serta upaya menghindari pajak bisa termasuk pelanggaran hukum.

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut langsung dan pajak tidak langsung. Pajak dapat dibayarkan dengan uang ataupun kompensasi yang setara uang, misalnya dengan pekerjaan. Ada beberapa negara di dunia ,yang sama sekali tidak memungut pajak dari rakyatnya, seperti uni Emirat Arab. Ada juga negara yang bergantung pendapatan dan operasional negaranya dari pajak. Pemerintah kita telah mempunyai suatu lembaga khusus mengelola pajak

yaitu Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas untuk memaksimalkan hasil pungutan pajak di seluruh wilayah Indonesia, dirjen pajak ini sendiri berdiri dibawah naungan Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan hal penting dan vital bagi setiap negara. Semakin maju sebuah negara semakin tinggi tingkat kepatuhan warga negaranya dalam membayar pajak. Karena dengan pajak pemerintahan suatu negara bisa membiayai semua fasilitas untuk rakyatnya. Fasilitas yang dibangun tidak hanya fasilitas yang bersifat vital bagi negara yang bersangkutan tapi juga infrastruktur lain yang sifatnya memberikan kebanggaan bagi warganya. Bisa dikatakan, bahwa pajak adalah ujung tombak utama pembangunan suatu negara. Untuk mengulas lebih jauh tentang pajak, berikut ini definisi pajak menurut para ahli dan unsur unsur pajak.

Menurut Adriani dikutip oleh Suprianto (2011 : 2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Waluyo (2013 : 2) mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum,

segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Sari, (2013:35) Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Sumarsan (2013:3) mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Resmi (2013:2) mengemukakan pengertian pajak : “ Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu “. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2014:9) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax payer*) harus menjadi perhatian semua pihak.

Suandy (2014:12), pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulernd*).

1. Fungsi Finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi mengatur (*regulernd*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan pemerintah.

Dalam perkembangannya, fungsi pajak selain yang telah disebutkan di atas terdapat dua fungsi lagi yaitu :

#### 1. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

#### 2. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerintahaan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena kedua fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat moderen, kedua fungsi tersebut menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2013:3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah



berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi Regulernd (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regularend. Namun dalam perkembangannya, menurut Ilyas dan Burton (2013:13-14) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

#### 2. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016 : 3) Pajak bukan hanya dipungut untuk disetor ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut :

#### a) Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b) Fungsi stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi .

c) Fungsi pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan dalam penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa membayar pajak, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Wiryawan (2010:29) menyatakan jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sasarannya/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

## 3. Menurut pemungutnya

Menurut Lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan pajak pusat dikumpulkan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-harinya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau obyek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak yaitu :

a) Tarif pajak tunggal meliputi :

- 1) Tarif tetap, yaitu tarif pajak yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada besar kecilnya obyek pajak.
- 2) Tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap berapa pun jumlahnya obyek pajak.

b) Tarif pajak tunggal meliputi :

- 1) Tarif progresif, yaitu tarif pajak yang apabila obyek pajak semakin tinggi, maka tariff (%) pajak juga semakin tinggi
- 2) Tarif regresif, yaitu tarif pajak yang apabila obyek pajak semakin tinggi, maka tarif (%) pajaknya justru semakin menurun. Untuk lebih jelasnya maka dikemukakan contoh tarif pajak dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Obyek Pajak	Tarif Tetap	Tarif Proporsional	Tarif Progresif	Tarif Regresif
Rp. 50.000.000	Rp.25.000	5%	5%	25%
Rp.100.000.000	Rp.25.000	5%	15%	15%
Rp.160.000.000	Rp.35.000	30%	25%	5%

Sumber : Sudirman dan Amiruddin (2016:11)

Menurut Mardiasmo (2014:9), ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jika yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan (2010:32), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *official assessment*, *self assesment system*, dan *withholding system*.

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya

pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyeteror dan melaporkannya kepada fiskus, Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **2.1.6 Pajak Penghasilan**

Definisi penghasilan menurut UU PPh No. 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Waluyo (2013:87), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diberikan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberikan *progresif*, *proporsional* atau *regresif*.

##### **2.1.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2**

Menurut Puspa Dian (2016), PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

##### **2.1.6.2 Objek PPh Pasal 4 Ayat 2**

Dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU PPh Final 2008) di jelaskan bahwa:

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah."

Penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas merupakan objek pajak yang didasarkan pada pertimbangan dibawah ini:

- a. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- b. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- c. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- e. Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya (UU PPh Final 2008). Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



### **2.1.7 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan adalah salah satu pajak penghasilan yang disebutkan pada huruf d UU PPh Final 2008 yang mendapatkan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 (PP 34 Tahun 2016). Tarif PPh Final yang dikenakan dalam PP 34 Tahun 2016 atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

- a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
- b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
- c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bag, pembangunan untuk kepentingan umum.

### 2.1.8 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Adapun pengertian akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2013 : 45) perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain sebagai berikut :

#### 1. Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan Undang–Undang Perpajakan yang berlaku.

#### 2. Konsep

Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari:

- a. Dasar akrual (*accrual basic*). Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
- b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamasama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.
- c. Konservatif (*conservative*), yaitu konsep hati–hati, kemungkinan rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan

(cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian, contoh: penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah.

- d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Akrua stelsel (*stelsel accrual*). Pengaruh transaksi diakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya : pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.
- b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*).
- c. Konservatif tidak digunakan.
- d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

### 3. Tujuan

Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan kekayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.

### 4. Akibat penyimpangan

Akibat dari penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditor, investor dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di bidang perpajakan antara lain sanksi administrasi yang berupa denda, bunga kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara.

Jika kemudian kita tinjau kembali, maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

#### 1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

## 2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan penurunan asset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa yang diakui sebagai beban hanya dengan yang dapat dihubungkan dengan pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh.

Perbedaan-perbedaan ini berdampak pada jumlah laba. Laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Sedangkan Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku". Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu koreksi terhadap perhitungan laba ataupun rugi perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan demi perhitungan beban pajak.

### 2.1.9 Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, dan Estralita 2013: 218). Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:

#### 1. Beda Tetap

Suandy, (2011 : 87) menyatakan bahwa:

"Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari."

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

## 2. Beda waktu.

Perbedaan waktu (*timing differences*) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer Agoes dan Estralita (2013 : 219). Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

### 2.1.10 Akuntansi Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan.

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”. Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, akuntansi pajak menjadi sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan *self assessment*. Itu karena dalam sistem baru ini aparat pajak semakin dibatasi dalam menetapkan jumlah pajak, dan mendorong Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya dengan akuntansi pajak.

Supryanto (2011:2) mendefinisikan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT. Akuntansi pajak berfungsi sebagai Pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

#### **2.1.11 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46**

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- c. Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun berikut, peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup PSAK No. 46 menurut Margaretha (2006) adalah:

- a. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.
- b. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No.16 yang menyatakan “apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (yang dihitung menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang”.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut :

- 1) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.



- 2) Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
- 3) Beban Pajak atau Penghasilan Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada satu periode.
- 4) Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- 5) Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- 6) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan temporer dapat berupa :
  - a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
  - b. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.

### **2.1.12 Pengakuan dalam PSAK No. 46**

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan. (Keliat, Margaretha. 2006)

#### **2.1.12.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini**

Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban pajak kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva pajak kini.

#### **2.1.12.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan**

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan

pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI, 2009). Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari :

1. *Goodwill* negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan usaha,
2. Pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari :

- a. *Goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari :

- a) *Goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
- b) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

#### **2.1.12.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi**

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak

anggungan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

#### **2.1.12.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan**

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari (IAI 2015) :

- a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
- b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.

Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

#### **2.1.12.5 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46**

- a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

- b. Saling Menghapuskan (*offset*)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak

tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c. Beban Pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d. Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Penghasilan Final Dibayar Dimuka dan Pajak Penghasilan Final yang Masih Harus Dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

#### **2..1.12.6 Pengungkapan dalam PSAK No. 46**

Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :

- a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
- b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
- c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan
- d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba

akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.

- e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- f. Jumlah (dan Batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
- g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
- h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

#### **2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak badan diharapkan dapat dengan tertib memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat terhindar dari penegakan hukum berupa sanksi penjara dan sanksi-sanksi lainnya dari Direktorat Jendral Pajak. Karena

kepatuhan wajib Pajak yang tidak meningkat, akan mengurangi pendapatan negara dalam sektor pajak dan mengakibatkan jalannya roda pemerintahan terhambat. Oleh karena itu Ditjen Pajak meminta kepada Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak untuk bersikap kooperatif dan segera melunasi utang pajaknya agar terhindar dari penyanderaan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pajak, himbau Wahyu (w.w.w.pajak.go.id, 2015)

Berikut ini merupakan pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan adalah:

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Berdasarkan dari pengertian kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang taat adalah yang memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan tersebut, maka peran pemerintah sebagai fiskus sangat diharapkan agar dapat memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015: 95) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian Wajib Pajak menurut Suandy (2011:105) sebagai berikut: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

## 2.2 Tinjauan Empirik

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis dapat dilihat melalui kolom dibawah ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Sharen Eflin Juniver Putong, Sintje Rondonuwu, (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota	Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi perpajakan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal

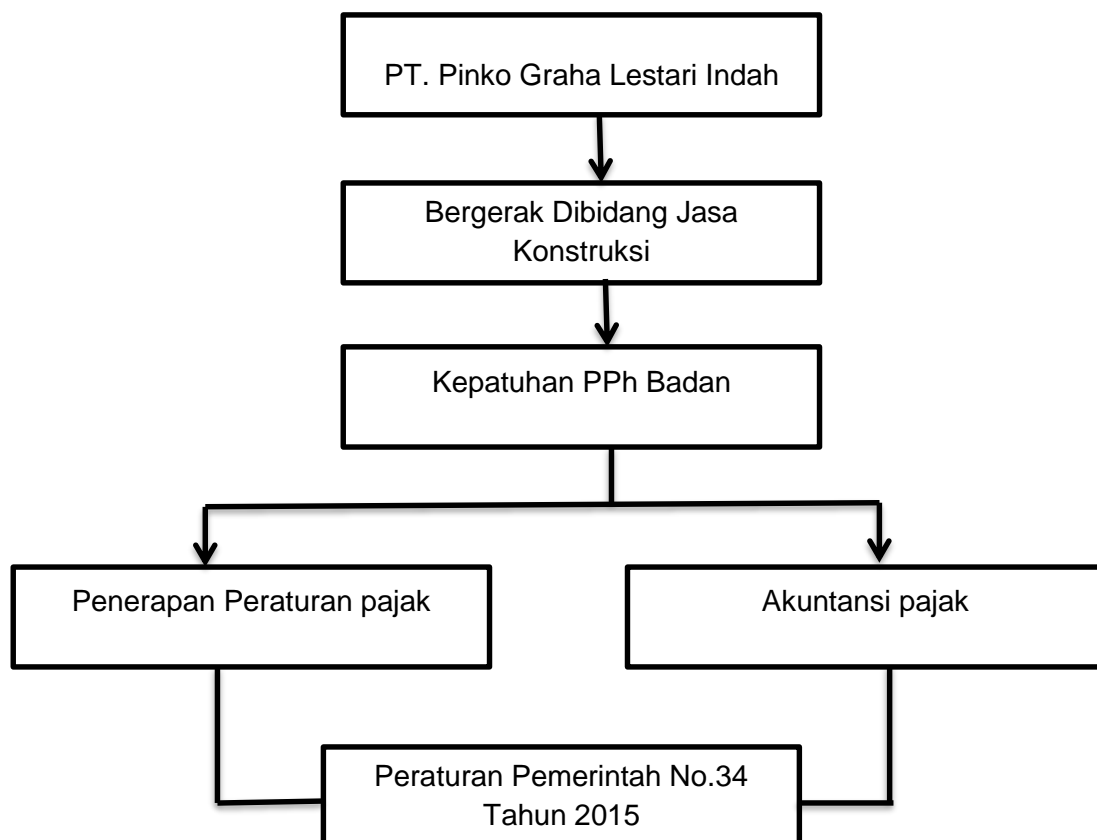


		23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Melihat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado adalah BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Pihak asuransi Jiwasraya untuk lebih aktif mengadakan dan mendorong masyarakat untuk mempercayakan perlindungan diri juga investasi bagi masa depan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado.
Dhian N Rembet, David P. Saerang, Heince Wokas. (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi perpajakan di PT. Dua Mutiara Sejati mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada, baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (2) dan juga PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Untuk itu sebagai rekomendasi diharapkan dari pihak perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan perkembangan untuk penerapan pajaknya guna memperbaiki system ataupun ketika ada peraturan perpajakan yang berlaku.
Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala	Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala telah dikenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya di bidang jasa konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto dan langsung dipotong oleh bendahara ketika CV. Cakrawala menerima pendapatan di bidang jasa konstruksi.
Yuly Arnita (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT . Stabilished Pavement Indo (Studi kasus pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru)	Hasil penelitian tersebut, ternyata perusahaan dalam membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah menjadi lebih besar pembayaran oleh perusahaan karena di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final dan pasal 23 tentang imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (yang tidak boleh di gabungkan oleh pajak penghasilan

		yang tidak final) maka dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto itu cukup jelas penjelasannya di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Muh Rasul (2015)	Perlakuan Perpajakan Untuk Bidang Jasa Konstruksi	Hasil karya ilmiah ini memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam bidang jasa konstruksi.

### 2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis penerapan pajak dan akuntansi pajak dalam rangka kepatuhan pajak penghasilan. Penelitian ini didasarkan pada kajian-kajian teoritik dan empirik sehingga peneliti mencoba merumuskan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : “ Diduga bahwa penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak pada PT. Pinko Graha Lestari Indah belum sesuai dengan peraturan Pemerintah No.34 tahun 2015 “.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada PT. Pinko Graha Lestari Indah dengan kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian adalah acuan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yang sesuai peraturan-peraturan dalam penelitian sehingga diperoleh data yang valid. Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif yakni mendeskripsikan, menjelaskan data dari variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Peneleitian**

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan pada PT. Pinko Graha Lestari Indah, berlokasi di Jalan Arafura-Buti No.1 Kelurahan Samkay Merauke. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2017.

#### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian yang temuat dalam operasional variabel penelitian. Adapun definisi operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”. Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dikemukakan dalam peneleitian ini bersumber dari :

#### **1. Jenis Data**

- a. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang bukan dalam bentuk angka-angka.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka meliputi jumlah karyawan serta data lainnya yang menunjang hasil penelitian ini.

## **2. Sumber Data**

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari PT. Pinko Graha Lestari Indah, berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen serta wawancara secara langsung dengan pimpinan maupun karyawan yang bersangkutan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul.

## **3. Teknik Pengumpulan data**

1. Observasi, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada PT. Pinko Graha Lestari Indah, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan perencanaan pajak
2. Wawancara, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bagian perpajakan dan akuntansi yang ada kaitannya dengan masalah perencanaan pajak.
3. Dokumentas, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip perusahaan mengenai penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak dalam rangka kepatuhan pajak penghasilan badan serta data lainnya yang menunjang penelitian ini.

### **3.5 Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : “ Analisis deskriptif komparatif yakni suatu analisis yang dilakukan untuk menguraikan

penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak yang dilakukan oleh PT. Pinko Graha Lestari Indah serta membandingkan penerapan peraturan pajak dan akuntansi pajak dengan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2015 “.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan pajak penghasilan final dengan PP. No. 34 tahun 2016, maka akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

1. Hasil analisis perhitungan PPh final yang dilakukan oleh perusahaan selama ini dimana perusahaan dalam melakukan PPh final sudah menetapkan berdasarkan nilai yang sesuai ditentukan dalam hal pengakuan hak atas tanah dan atau bangunan dan selain itu perusahaan menetapkan PPh final sebesar 1% dari penjualan yang diterima.
2. Hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi PPh final yang dilakukan oleh perusahaan yang menunjukkan bahwa tarif PPh final digunakan dalam pengenaan PPh final sebesar 1% dari nilai bruto dan selain itu disajikan ke dalam laporan keuangan perusahaan.

#### **5.2. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya dalam melakukan pernyataan PPh final kepada KPP, sebaiknya perusahaan membuat SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh final atas PPh badan yang disetor ke kas Negara, agar tidak terjadi pengenaan pajak secara ganda (PPh Final dan PPh Badan).



2. Perlunya perusahaan dalam menghitung PPh final, guna tetap berpedoman pada PP No. 34 tahun 2016, sehingga pajak penghasilan final yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2013 Akuntansi Perpajakan, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Andaki, A.M., S. J. Jullie., dan P. Sherly. 2015. Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (studi pada PT. Anugrah Adytama, Jakarta). Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Universitas Samratulangi Manado, vol 3, No. 1, hlm : 1193-1202
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2013."Hukum Pajak". Penerbit : Salemba Empat. Jakarta
- Dhian N Rembet, David P. Saerang, Heince Wokas. (2016) Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Keliat, B. A. (2006). Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa, Penerbit : EGC. Jakarta
- Mardiasmo. 2014. *Perpajakan Edisi Revisi* , Andi Offset, Yogyakarta
- Milanovira, 2015. Akuntansni Real Estate. Penerbit : Andi Publisher, Yogyakarta
- Muh Rasul (2015), Perlakuan Perpajakan Untuk Bidang Jasa Konstruksi, Jurnal Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015 Page 54 .
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit : Salemba Empat. Jakarta
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kelima Penerbit : Salemba Empat.Jakarta
- , 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kedelapan. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Supriyanto, Edy. 2011, Akuntansi Perpajakan. Penerbit : Graha Ilmu. Semarang
- Sari Diana, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, cetakan pertama, Penerbit : Refika Aditama, Bandung

- Sudirman Rismawati dan Antong Amiruddin, 2016 Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek, edisi revisi, Penerbit : Empat Dua Media, Bandung
- Sumarsan Thomas, 2013, Perpajakan Indonesia (Vol.3), Penerbit : Inc Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Penerbit : Graha Ilmu, Jakarta
- Sharen Eflin Juniver Putong, Sintje Rondonuwu, (2016), Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota Jurnal EMBA 807 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 807-816 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. SSN 2303-1174
- Suandy, Erly, 2011, Perencanaan Pajak, Edisi kelima, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- , 2014, Hukum Pajak, Edisi keenam, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No.4 Tahun 2016
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Yuly Arnita (2013), Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Stabilished Pavement Indo (Studi kasus pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.